

BAB V

ANALISIS HAM DI INDIA DAN PERAN PELAKSANAAN UN WOMEN DI INDIA

5.1 Analisis Hak Asasi Manusia di India Yang Menimpa Perempuan dan Anak Tahun 2018-2020

Kasus diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak di India antara tahun 2018 hingga 2020 dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan pelanggaran terhadap HAM yang memerlukan perhatian serius dan upaya penanganan yang efektif. Berikut adalah analisis kasus ini berdasarkan konsep HAM:

1. Hak Hidup dan Kebebasan dari Kekerasan: Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak melanggar hak mereka untuk hidup dengan bebas dari ancaman, kekerasan, dan penindasan. Jika dalam periode tersebut terdapat peningkatan kasus kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, atau psikologis terhadap perempuan dan anak-anak di India, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak dasar mereka.
2. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Diskriminasi gender dan diskriminasi terhadap anak-anak merupakan pelanggaran hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Jika dalam periode tersebut ada laporan tentang diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak

lainnya berdasarkan gender atau usia, maka ini merupakan pelanggaran hak dasar mereka.

3. Hak Privasi dan Martabat: Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak juga melanggar hak privasi dan martabat mereka. Jika kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan tanpa adanya perlindungan privasi dan rasa martabat bagi korban, ini menjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.
4. Hak Perlindungan Hukum: Ketidakmampuan sistem peradilan untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak perlindungan hukum. Jika kasus-kasus ini tidak ditangani secara adil, efisien, dan transparan, hak korban untuk mendapatkan keadilan terpenuhi.
5. Hak Partisipasi dan Representasi: Partisipasi perempuan dan anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses publik juga merupakan aspek penting dari HAM. Jika dalam periode tersebut terjadi pembatasan atau hambatan terhadap partisipasi dan representasi mereka dalam berbagai bidang, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak partisipasi dan representasi.
6. Hak Pendidikan dan Kesehatan: Diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pendidikan dan kesehatan. Jika terdapat laporan tentang kesenjangan dalam akses pendidikan

dan layanan kesehatan antara jenis kelamin atau kelompok umur, hal ini melanggar hak dasar ini.

7. Hak Perlindungan Terhadap Eksploitasi: Jika terjadi peningkatan kasus eksploitasi seperti perdagangan manusia atau kerja paksa terhadap perempuan dan anak-anak dalam periode tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak perlindungan terhadap eksploitasi.
8. Hak Rehabilitasi dan Pemulihan: Korban kekerasan, terutama anak-anak, memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan fisik serta psikologis. Jika dalam periode tersebut terdapat ketidakmampuan dalam memberikan dukungan rehabilitasi yang memadai bagi para korban, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ini.

Dalam analisis berdasarkan konsep HAM, kasus diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak di India antara tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak dasar mereka. Upaya yang lebih serius dan koordinatif diperlukan untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

5.2 Analisis Peran Yang Dilakukan UN Women Dalam Menangani Kasus Diskriminasi Perempuan dan Anak di India

Kasus diskriminasi yang menimpa perempuan di India sudah menjadi sorotan dunia Internasional, yang membuat kasus ini menjadi salah satu kasus yang UN

Women turun langsung ke dalamnya, serta menjadi beberapa solusi untuk menangani hal ini. Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang serius dan tinggi di negara India. India menjadi salah satu negara yang tidak aman untuk perempuan. Sejak masa kemerdekaan, India telah banyak mengeluarkan dan membuat beberapa undang-undang untuk bisa memberikan keamanan untuk perempuan di India. Seperti pada tahun 2010 India membentuk sebuah *Protection of Women From Sexual Harassment Bill*, undang-undang ini memberi jaminan perlindungan terhadap perempuan mulai dari pelecehan seksual dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

Sudah ada undang-undang dan upaya oleh pemerintahan India tetapi dalam implementasi nya terjadi kendala karena adanya bias dalam pemahaman mengenai posisi perempuan dari sisi budaya India. Walaupun pemerintahan India terus memperbaharui undang-undang serta hukum mengenai kasus ini seperti merevisi atau membuat kebijakan baru lainnya. Tetapi ini semua dirasa tidak akan maksimal jika tidak adanya kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional khususnya lembaga yang bergerak di bidang isu kekerasan seperti UN Women. Dengan adanya konsep kerjasama internasional, yang mengatakan kerjasama internasional dibutuhkan karena terdapat hubungan yang saling berketergantungan antara aktor internasional untuk menyikapi permasalahan ini bersama. Di sini UN Women sebagai sebuah organisasi internasional yang dibawah payung PBB, yang fokusnya kepada isu-isu perempuan serta dapat membantu pemerintah India untuk bisa menuntaskan masalah

yang menimpa perempuan di India melalui sebuah penyediaan dana dan menyediakan program-program kepada pemerintah India.



Gambar 5.1.1 *Peace and Security Internship at UN Women* (sumber: youthop.com)

Kerjasama yang dibentuk oleh UN Women pada dasarnya sudah ada pada CEDAW di tahun 1993. Pada tahun 1995 India ini menjadi salah satu negara yang tergabung pada *Beijing Platform for Action* untuk bisa berupaya meningkatkan akses dan peran perempuan dalam sumber daya ekonomi, sosial budaya dan politik. Pertemuan ini melahirkan kebijakan Nasional India untuk bisa memberdayakan perempuan. Dalam upaya menangani kasus pelanggaran atas hak dan diskriminasi gender di India, UN Women sendiri memberi berupa dan bantuan dari perwakilan PBB untuk bisa mengakhiri kekerasan perempuan dengan adanya program “Preventing Violence: Change Starts Now in India”. Dana ini dialokasikan untuk program ini bertujuan untuk memastikan banyak perempuan dan anak perempuan di 15 wilayah dari enam bagian kota Delhi memiliki akses yang lebih layak dan mudah ke layanan

hukum, lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dan menekan adanya kekerasan di dalam domestik dan pelecehan di tempat umum.

Dengan melihat teori Organisasi Internasional yang mengatakan Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sara untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: 1. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya. 2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalahmasalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya, ataupun masalah dalam negeri dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi, UN Women memiliki tujuan yang sama dengan pemerintahan India untuk bisa mengurangi kekerasan yang menimpa perempuan dan melahirkan kesetaraan gender di seluruh dunia. UN Women sebagai lembaga yang resmi PBB memiliki peran yang penting untuk menangani kasus yang dihadapi negara-negara anggotanya di sektor politik, ekonomi dan sosial budaya. Adanya UN Women di India merupakan

salah satu bentuk jawaban atas kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan membantu untuk mengatasi dan menyelesaikan bentuk dari tindakan kekerasan kepada perempuan di India. Organisasi Internasional memiliki tiga peranan dalam mencapai sebuah tujuan sebagai instrumen, arena dan aktor yang independen, ketiga konsep inilah yang dijalankan oleh UN Women;

Pertama, UN Women sebagai alat yang digunakan disebagian negara anggota nya untuk bisa mencapai tujuan yang berdasarkan politik luar negeri, tujuan dari UN Women adalah untuk mempercepat sebuah kemajuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak, meningkatkan kemudahan untuk perempuan dapat mengakses pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk perdamaian dan keamanan, serta mewujudkan kesetaraan gender di dunia. Untuk mencapai hal ini tentunya UN Women membutuhkan advokasi seperti pembuatan kebijakan, standar global dan norma. Ini menjadi sebuah elemen untuk dapat mencakup dari ide-ide perempuan untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Dan Menjadi suatu bentuk instrumental seperti hal nya fasilitator dan juga berlaku sebagai koordinator dalam menjadikan sebuah perubahan dengan keterlibatan nya perempuan.

Kedua, UN Women sebagai arena. Yang mana menjadi wadah berkumpulnya negara anggota untuk bisa berdiskusi tentang suatu isu permasalahan negara anggota nya untuk bisa berdiskusi mengenai suatu isu yang sedang menimpa dunia, dan menjadi wadah untuk bisa anggota nya menyampaikan permasalahan yang sedang menimpa negaranya. Dengan adanya pernyataan dari hal ini, organisasi internasional berperan

untuk bisa menjadi wadah pertemuan negara-negara anggotanya untuk dapat membahas mengenai permasalahan yang sedang berkembang. Di sini UN Women sebagai organisasi internasional bisa menjadi wadah untuk berdebat, berdiskusi, menjalin kerjasama atau hanya untuk menyampaikan sebuah permasalahan yang tengah dialami dan menjadi pertimbangan untuk keseriusannya.

Ketiga, sebagai aktor. Organisasi Internasional adalah aktor independen yang harus bersifat netral dalam mengeluarkan keputusan sendiri tanpa adanya ikut campur dan paksaan dari luar organisasi⁵³. UN Women di sini sebagai aktor, dalam membuat keputusan organisasi harus netral dan mandiri agar bisa mengeluarkan keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya. UN Women menjadi salah satu bagian dari PBB, dalam membuat kebijakannya harus memiliki dua dewan yang memegang kendali dalam seluruh mengambil keputusan, pertimbangan kebijakan dan program-program dari dalam organisasi. Dewan pertama adalah Komisi Status Perempuan yang tugasnya untuk membuat kebijakan dan program-program UN Women, dan Dewan Eksekutif yang tugasnya adalah memberikan pengaturan entitas untuk bisa memberikan dukungan antar pemerintah dan pengawas kegiatan operasional⁵⁴.

Analisis yang dilakukan organisasi internasional akan memberikan sejumlah peranan lain seperti sebagai fasilitator, mediator dan inisiator. Untuk bisa tercapainya

⁵³ Archer, Clive. 1983. International Organization. London. Allen & Unwin Ltd.v

⁵⁴ Andre Pareria, 1993, "Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional". Bandung: Citra AditiaBakri Press, hal.135

kepentingan dari tujuan UN Women dalam pemerintahan India, maka perlu diimplementasikan ke dalam bentuk ketiga peranan tersebut.

5.3 Tiga Peranan UN Women Untuk Terlibat dan Menangani Kasus Diskriminasi Perempuan dan Anak di India Tahun 2018- 2020

Terdapat 3 peranan nyata yang diberikan oleh UN Women untuk bisa mengurangi angka diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak di India pada tahun 2018-2020 serta bentuk dari keseriusan UN Women untuk menyikapi kasus ini yang sudah menjadi topik Internasional.

5.3.1 UN Women sebagai Fasilitator

Pertama, adalah peranan sebagai Fasilitator, UN Women berperan sebagai fasilitator untuk menyediakan fasilitas untuk penyelesaian masalah agar bisa merealisasikan tujuan. UN Women yang berperan sebagai organisasi internasional, memiliki peran untuk menyediakan fasilitas untuk bisa menyelesaikan masalah, bahwasannya mampu untuk bisa merealisasikan tujuan dari organisasi dan negara-negara anggotanya. Dalam kasus kekerasan perempuan di India, UN Women bisa berperan sebagai fasilitator dengan cara melakukan sebuah tindakan untuk bisa memfasilitasi pemerintahan India untuk bisa melakukan beberapa program yang dibuat oleh UN Women dan pemerintahan India, dan juga LSM yang turut andil dalam isu kekerasan yang menimpa perempuan di India.

Program yang dibuat oleh pemerintahan India dan UN Women bisa berfokus pada beberapa aspek seperti meningkatnya kepemimpinan dan partisipasi perempuan di beberapa bidang, bisa meningkatkan akses perempuan untuk bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dapat meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan untuk merespon kemanusiaan. Untuk bisa meningkatkan kepemimpinan dan andil perempuan, UN Women dan pemerintahan India bisa membantu perempuan yang beruntung untuk bisa mewujudkan hak-hak mereka dan menciptakan keterampilan melalui program “Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan perempuan di India dan Asia Selatan”. Yang mana program ini dibentuk untuk bisa memberdayakan setengah juta perempuan terpilih di lima negara bagian India atau jika dihitung setara dengan 365 juta populasi masyarakat India.

UN Women juga mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan India mengenai isu-isu kekerasan kepada perempuan baik dalam internal maupun eksternal. Dalam hal internal, perempuan sebagai pengambil keputusan nya, sedangkan eksternal nya adalah langkah-langkah ke depan untuk upaya integrasi dan penanganan kekerasan kepada perempuan di India sampai adanya keikutsertaan perempuan dalam dunia Internasional. Guna mengimplementasikan program ini, UN Women menggunakan beberapa strategi untuk bisa agenda nya ini masuk ke dalam sistem politik di India, seperti bekerja sama dengan beberapa negara bagian di India, membuat regulasi seperti visi misi dari sayap UN Women seperti keterlibatan organisasi lokal yang ada di negara

bagian India, sampai merangkul simpati dan beberapa negara lain untuk bisa masuk ke dalam untuk menangani dan melakukan reformasi pada pemerintahan India.⁵⁵

Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi menjadi salah satu fokus yang penting di dalam rencana program UN Women, karena banyak perempuan yang masih merasakan diskriminasi dan menjadi korban kekerasan. Jumlah perempuan India saja yang berpartisipasi dalam dunia pekerjaan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahkan perempuan ditemui dalam pekerjaannya tidak tetap yang mana pekerjaannya hanya membutuhkan keterampilan yang rendah. Untuk menangani hal ini, UN Women memberikan bantuan dana keuangan kepada pemerintahan India untuk bisa memaksimalkan dampak yang berkelanjutan untuk investasi dan juga menyukseskan Agenda SDGs 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, dana untuk kesetaraan gender telah berhasil terkumpul sebesar 64.000.000 dolar untuk program beasiswa. Hingga saat ini program ini telah dirasakan oleh lebih dari sepuluh juta perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki sebagai penerima manfaatnya yang tidak langsung.

Dalam bentuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi, UN Women dan pemerintahan India ini juga mengajak warga sipil untuk bisa melakukan inklusi pemberdayaan digital, melalui program *Information and Communication Technology*. Yang mana, memberikan kesempatan kepada perempuan India yang ekonominya menengah untuk bisa mengembangkan kapasitasnya di bidang komputer. ICT di India

⁵⁵ Amirthalingam, K. (2005). Women's rights, international norms, and domestic violence: Asian perspectives. *Human Rights Quarterly* 27.

dikembangkan di 16 daerah yang terbagi ke dalam lima negara bagian; Odisha, Rajasthan, Andhara, Karnataka, dan Madhya Pradesh, untuk bisa mempromosikan perwakilannya (perempuan) terpilih dan dapat memimpin dalam penyediaan layanan dan pengguna informasi.⁵⁶ UN Women juga menjadi wadah untuk penghubung antara kerjasama organisasi lainnya seperti Kutch Mahila Vikas Sangathan. Dengan kerjasama ini, dapat meningkatkan kesadaran perempuan dalam dunia teknologi, maka harapannya perempuan bisa mendapat kesetaraan gender dan bisa berpartisipasi dalam aspek ekonomi.

5.3.2 UN Women sebagai Mediator

UN Women juga menjadi mediator. Yang mana peran ini sebagai pihak penengah antara suatu masalah maupun konflik yang sedang terjadi di negara anggotanya. UN Women memiliki peran mediator yang dapat dilihat melalui fokus bidang UN Women untuk mengakhiri kekerasan yang menimpa perempuan dan anak perempuan. UN Women bisa menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dengan cara mendukung ruang publik yang aman untuk perempuan di wilayah yang berbahaya untuk perempuan lewat program *safe cities free of violence against women and girl*. Yang mana program ini harapannya bisa membantu mengatasi kekerasan dan bisa mencegah tindakan pelecehan seksual di ruang publik.

⁵⁶ UN Women (2013). UN Women Annual Report 2012-2013. New York: UN Women.

UN Women dalam upayanya juga membangun relasi dengan pemerintahan daerah Delhi untuk mengeksplorasi, mencari solusi dan membuat strategi untuk kota Delhi dapat menjadi tempat yang aman untuk perempuan. Untuk bisa menyukseskan program ini, UN Women bekerjasama dengan beberapa departemen seperti Pengembangan Perempuan dan Anak, Pemerintahan DELhi, Pusat Studi Media atau center for media. Beberapa orang yang memegang kepentingan juga telah diajak untuk bisa berkontribusi dan rencananya juga akan melibatkan banyak mitra seperti departemen pendidikan dan LSM yang berfokus pada isu-isu perempuan. Peran UN Women dalam hal menjadi mediator juga ditunjukkan dari memastikan bahwa perempuan bisa berpartisipasi secara aktif dalam hal politik dan menyuarakan pendapatnya secara bebas dengan memberikan wadah pertemuan antara perempuan maupun laki-laki.

5.3.3 UN Women sebagai Inisiator

UN Women juga berperan sebagai inisiator, yang mana organisasi internasional memiliki peranan penting untuk mengajukan suatu masalah atau suatu fenomena ke komunitas internasional dalam sebuah forum, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah solusi bahkan sebuah kerjasama. Peran dari inisiator ini adalah diimplementasikan oleh UN Women dengan cara menginisiasikan negara-negara, organisasi di bidang kemanusiaan dan pemerintahan India untuk bisa bekerjasama dengan pihak UN Women untuk bisa mengatasi masalah kekerasan kepada perempuan

dan menciptakan kesetaraan gender. UN Women sebagai inisiator juga berperan untuk mengajukan segala kasus kemanusiaan dan kekerasan kepada perempuan di India kepada komunitas internasional dalam hal ini PBB, UNDP, DPKO. UN Women bekerja dengan beberapa organisasi untuk bisa memberikan dukungan kepada pembangunan kapasitas negara di beberapa wilayah dengan tujuan untuk bisa memfasilitasi kemudahan perempuan dalam mendapatkan akses terhadap operasi perdamaian dan keamanan.

Inisiatif yang dilakukan UN Women membuka peluang kerjasama untuk bisa menciptakan keadaan yang lebih baik untuk perempuan India. Dengan adanya kerjasama harapannya bisa membangun sistem keamanan yang lebih luas, terutama pada daerah konflik yang berisiko menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Dengan ini UN Women bisa mendukung pemerintah India dengan memberikan pelatihan kepolisian dan perwira militer perempuan, untuk merespon pencegahan konflik kekerasan seksual di India. Perempuan PBB di India telah bermitra untuk pusat pelatihan pemeliharaan perdamaian nasional India guna memfasilitasi kursus tentang kekerasan seksual di dalam konflik bersenjata untuk empat tahun terakhir. UN Women memiliki wewenang untuk bisa melakukan *joint strategy* sebagai sebuah mediator di sejumlah negara untuk bisa melakukan kolaborasi bersama *Department of political Affairs*, pada bidang ini UN Women dapat memasukan unsur perempuan sebagai mediator nya. Perempuan pada hal ini bisa menduduki level yang strategis untuk menjadi fasilitator, mediator, dan sebagai salah satu elemen di dalam perumusan

kebijakan untuk konferensi internasional yang tujuannya adalah memberikan sebuah pengaruh dampak kelangsungan agenda pada isu kesetaraan yang bisa masuk ke dalam upaya kedamaian.⁵⁷



⁵⁷ Ford, L. 2013. UN Women's Proposal. Diakses dari <https://www.theguardian.com/international> pada 2 Juni 2023